



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

SEMESTER I

BULAN JANUARI 2020 S/D JUNI 2020

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Disahkan di Pekalongan
Pada Hari Selasa, 30 Juni 2020

Management Reprerentative,



ELIN PUJIASTUTI, S.H.,M.H.

NIP. 197612272001122001

Panmud Hukum,



RIA SORAYA, S.H.

NIP.19630110 198903 2 001

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan



R. SUTAJI, S.H.,M.H.

NIP. 19581025 198201 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	14
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	23
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa, atas segala rahmat dan barokah-Nya sehingga kami dari Tim Survei dapat menyusun laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan ini.

Survei tentang persepsi korupsi merupakan upaya mengetahui bagaimana implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di dalam tubuh lembaga peradilan khususnya Pengadilan negeri pekalongan, sebagaimana amanah dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012 -2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012 -2014 yang dievaluasi setiap tahunnya. Dan dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut. Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK (Transparency International, 2016

Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai bagian dari unsur pelaksana telah berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi semaksimal mungkin dengan pembenahan dan pengelolaan birokrasi-administrasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang. Selain daripada pembenahan administrasi Pengadilan Negeri Pekalongan tengah berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang prima sehingga memudahkan urusan bagi masyarakat pencari keadilan dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Upaya-upaya tersebut di atas tengah di jalankan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, namun demikian dukungan dari masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan sangat diperlukan. Dengan pemberian penilaian yang obyektif dari survei yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam menjalankan kewenangannya dengan didasari oleh undang-undang yang berlaku.

Akhirnya tim Survei menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mohon atas kritik dan saran guna menjadi perbaikan dikemudian hari dan tidak lupa kami dari tim survei menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.-

Pekalongan, Juni 2020

TIM SURVEI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Pekalongan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

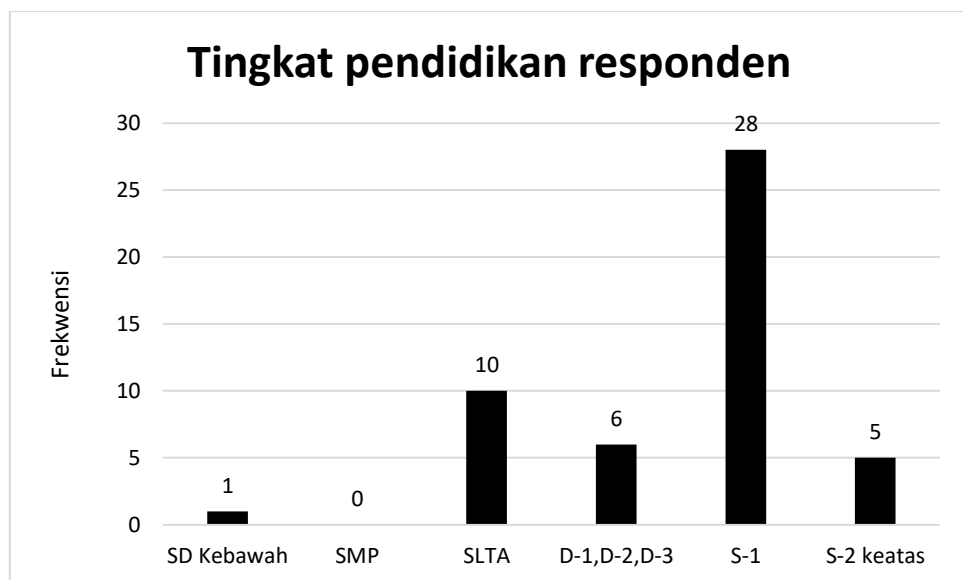
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Menengah dan Atas.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD Kebawah	1	2
2	SMP	0	0
3	SLTA	10	20
4	D-1,D-2,D-3	6	12
5	S-1	28	56
6	S-2 keatas	5	10
Jumlah		50	100



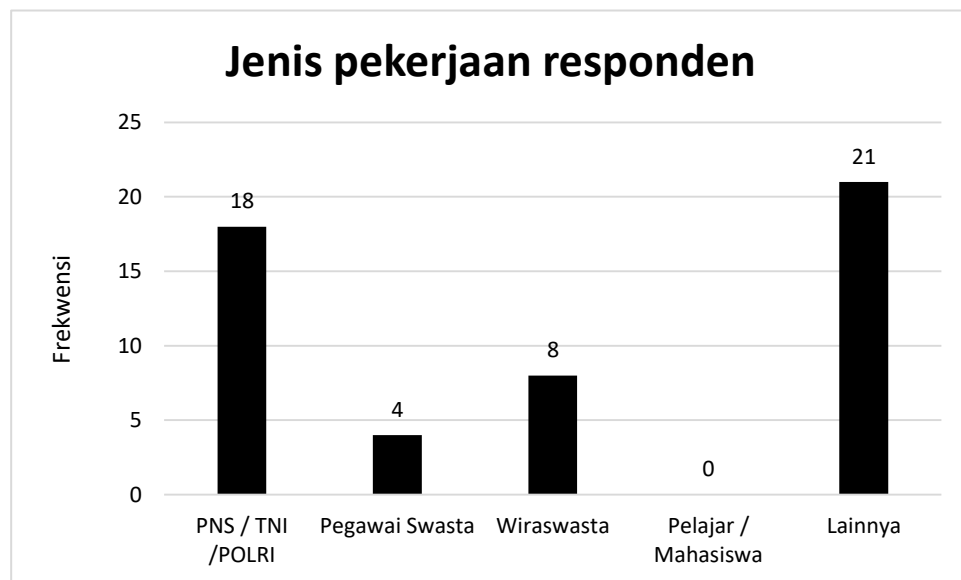
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 42% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pekalongan memiliki pekerjaan sebagai pekerjaan lainnya, diantaranya profesi Advokat, buruh, nelayan, Petani dan sebagainya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS / TNI / POLRI	18	34
2	Pegawai Swasta	4	8
3	Wiraswasta	8	16
4	Pelajar / Mahasiswa	0	0
5	Lainnya	21	42
Jumlah		50	100

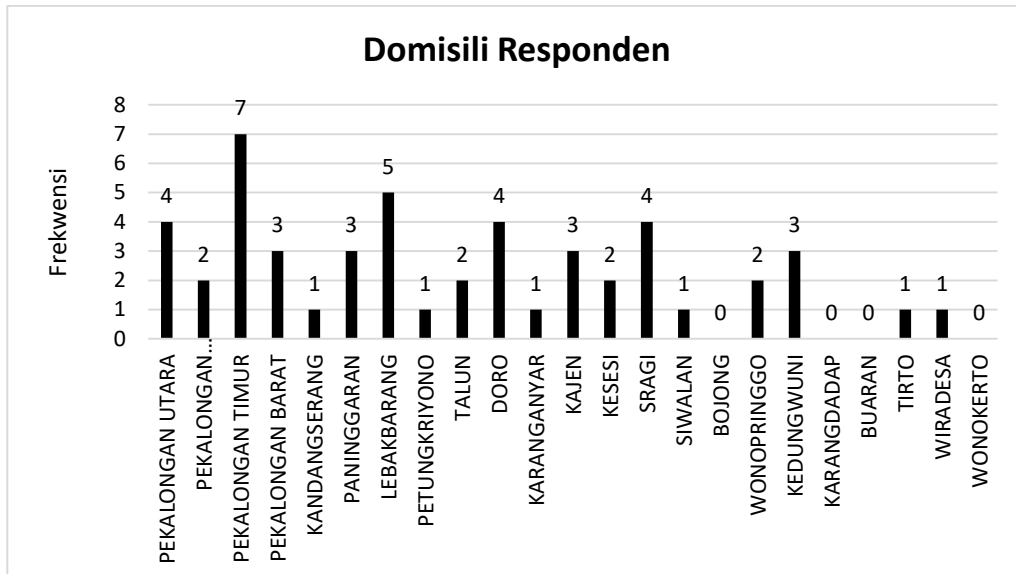


3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari kecamatan Pekalongan Timur dengan 14%.

Tabel 6
Domisili Responden

No	Kecamatan	Frekuensi	%
KOTA PEKALONGAN			
1	PEKALONGAN UTARA	4	8
2	PEKALONGAN SELATAN	2	4
3	PEKALONGAN TIMUR	7	14
4	PEKALONGAN BARAT	3	6
KABUPATEN PEKALONGAN			
1	KANDANGSERANG	1	2
2	PANINGGARAN	3	6
3	LEBAKBARANG	5	10
4	PETUNGKRIYONO	1	2
5	TALUN	2	4
6	DORO	4	8
7	KARANGANYAR	1	2
8	KAJEN	3	6
9	KESESI	2	4
10	SRAGI	4	8
11	SIWALAN	1	2
12	BOJONG	0	0
13	WONOPRINGGO	2	4
14	KEDUNGWUNI	3	6
15	KARANGDADAP	0	0
16	BUARAN	0	0
17	TIRTO	1	2
18	WIRADESA	1	2
19	WONOKERTO	0	0
Jumlah		50	100

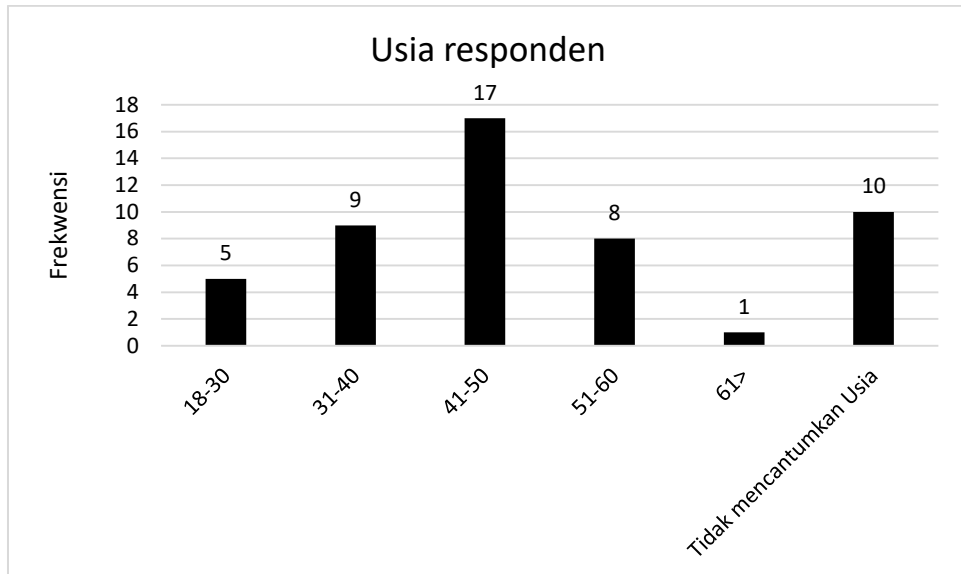


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 41 tahun s/d 50 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-30	5	10
2	31-40	9	18
3	41-50	17	34
4	51-60	8	16
5	61>	1	2
6	Tidak mencantumkan Usia	10	20
Jumlah		50	100%



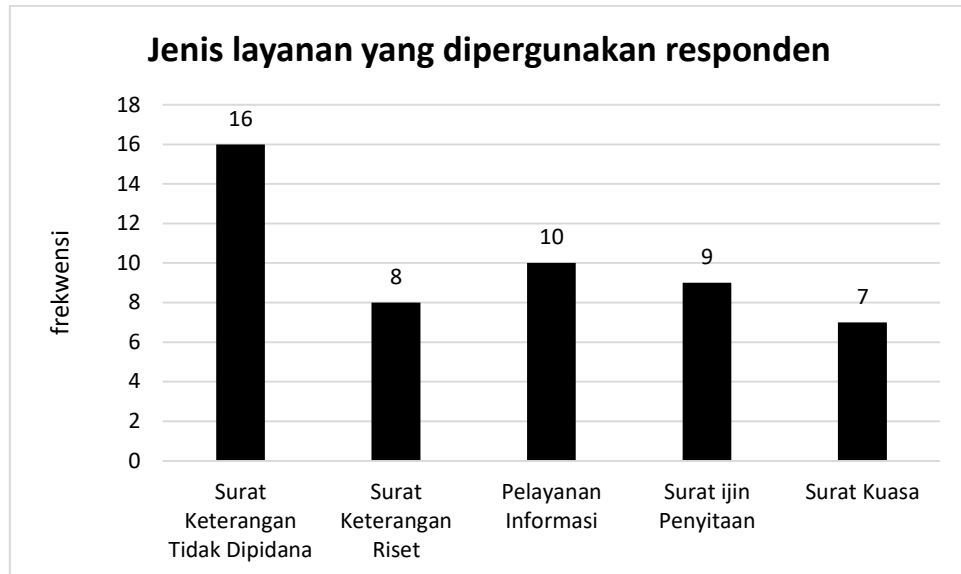
3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Surat Keterangan Tidak Dipidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 32%.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Jenis Layanan	Frekuensi	%
1	Surat Keterangan Tidak Dipidana	16	32
2	Surat Keterangan Riset	8	16
3	Pelayanan Informasi	10	20
4	Surat ijin Penyitaan	9	18
5	Surat Kuasa	7	14
Jumlah		50	100%



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

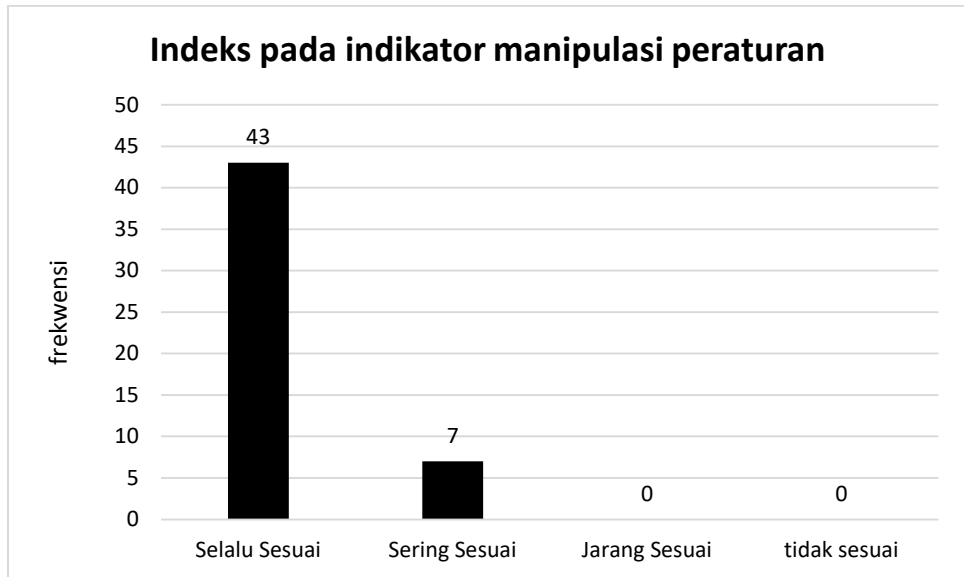
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,86

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih dari Manupulasi Peraturan

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Sesuai	4	43	86
2.	Sering Sesuai	3	7	14
3.	Jarang Sesuai	2	0	0
4.	tidak sesuai	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

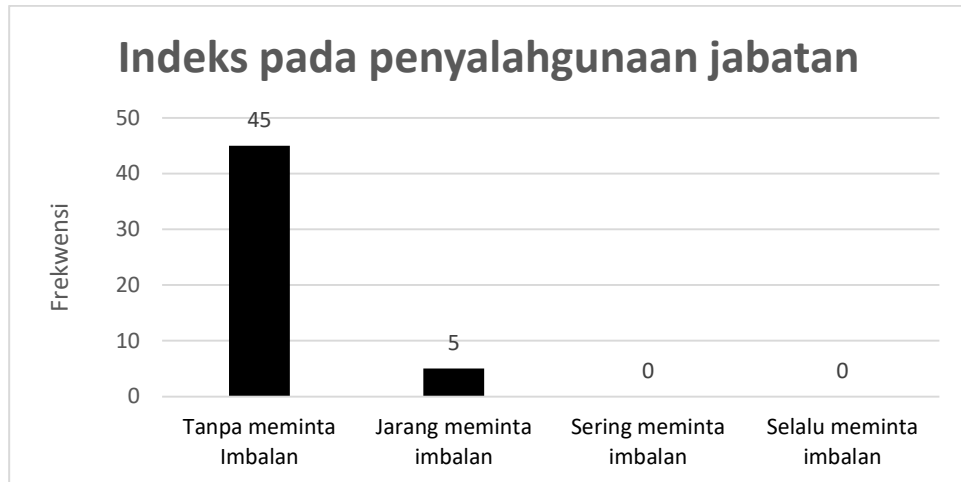
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,9

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tanpa imbalan meminta	4	45	90
2.	Jarang imbalan meminta	3	5	10
3.	Sering imbalan meminta	2	0	0
4.	Selalu imbalan meminta	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

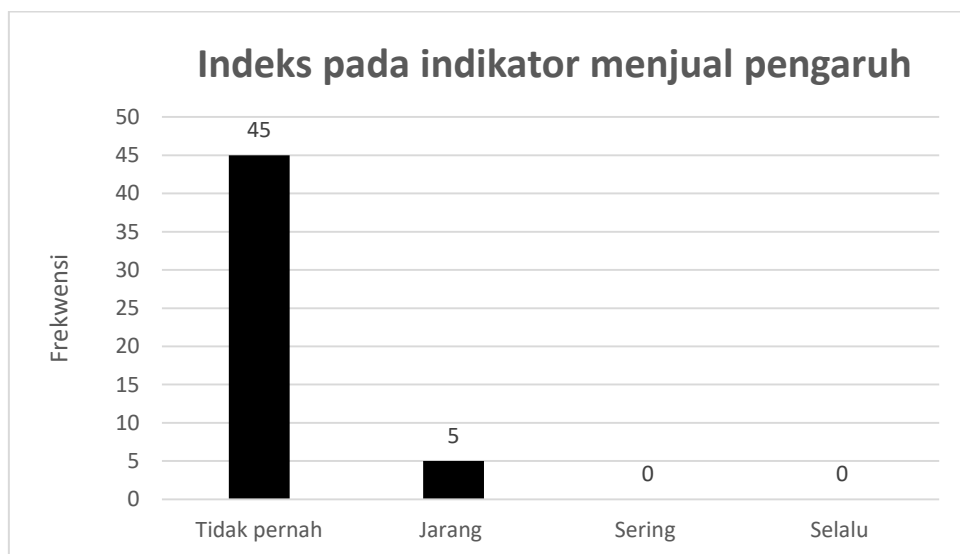
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,9

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih dari Menjual Pengaruh

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak pernah	4	45	90
2.	Jarang	3	5	10
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

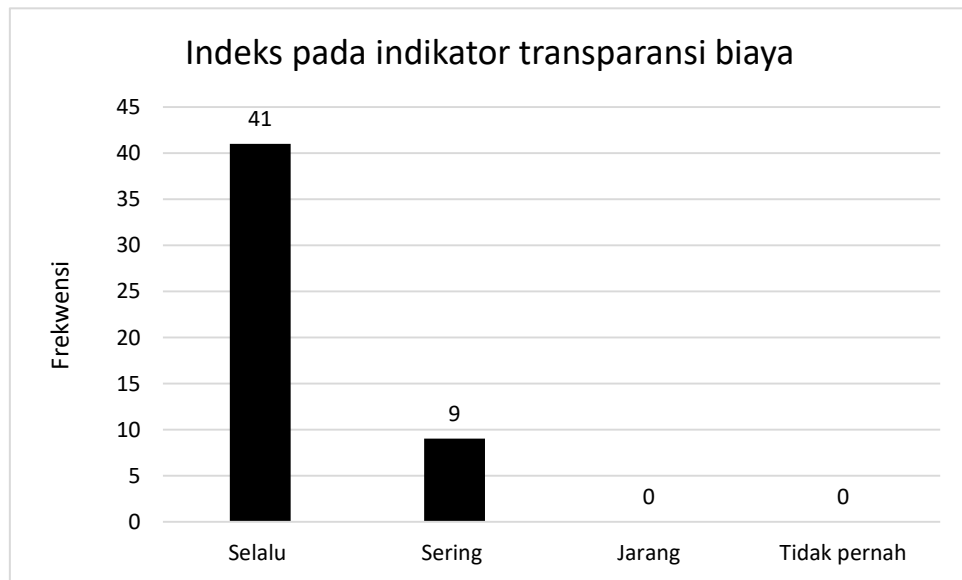
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,82

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan selalu transparansi Biaya.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	41	82
2.	Sering	3	9	18
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak pernah	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

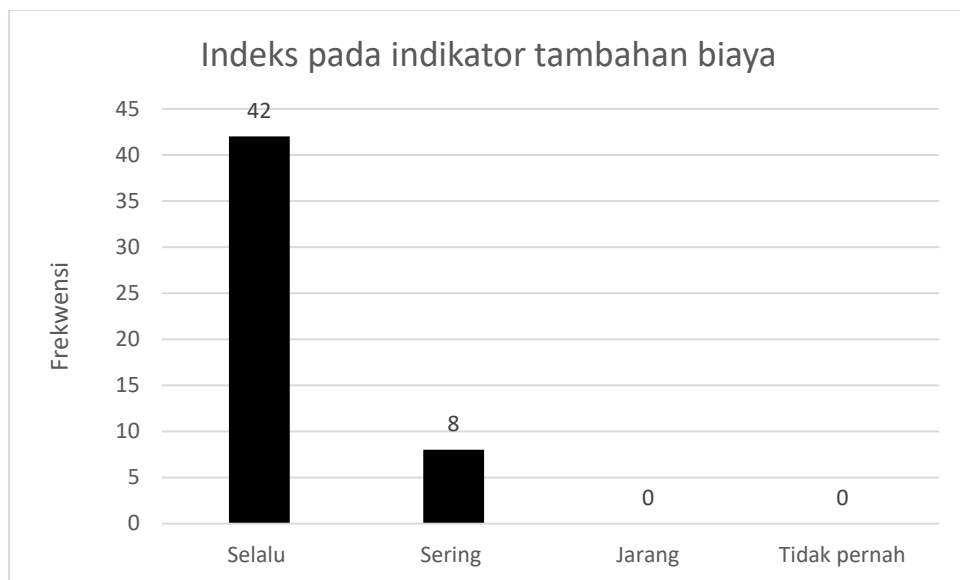
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,96

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan selalu membayar sesuai biaya/ tarif

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	42	84
2.	Sering	2	8	16
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak pernah	4	0	0
Jumlah			50	100



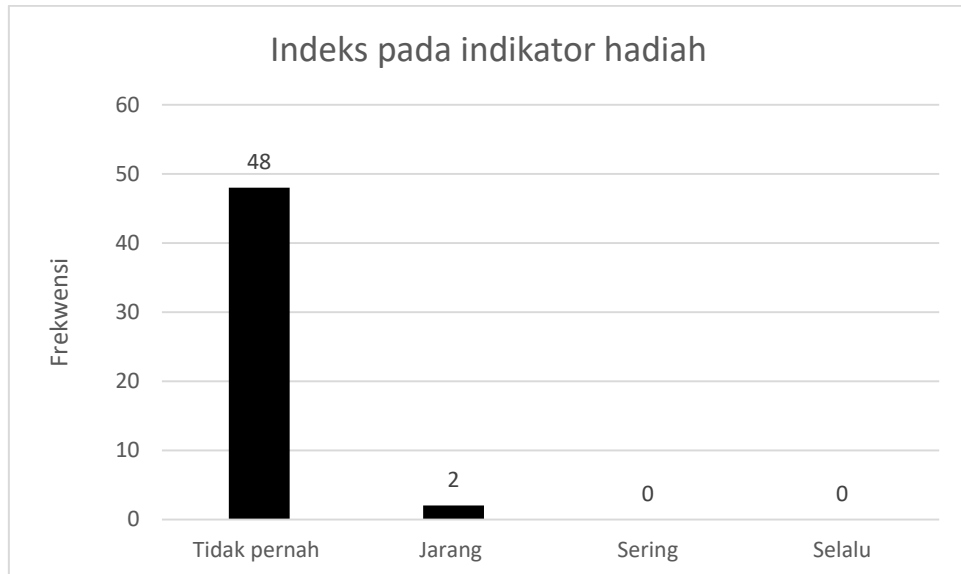
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,96 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih dari pemberian Hadiah

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak pernah	4	48	96
2.	Jarang	3	2	4
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

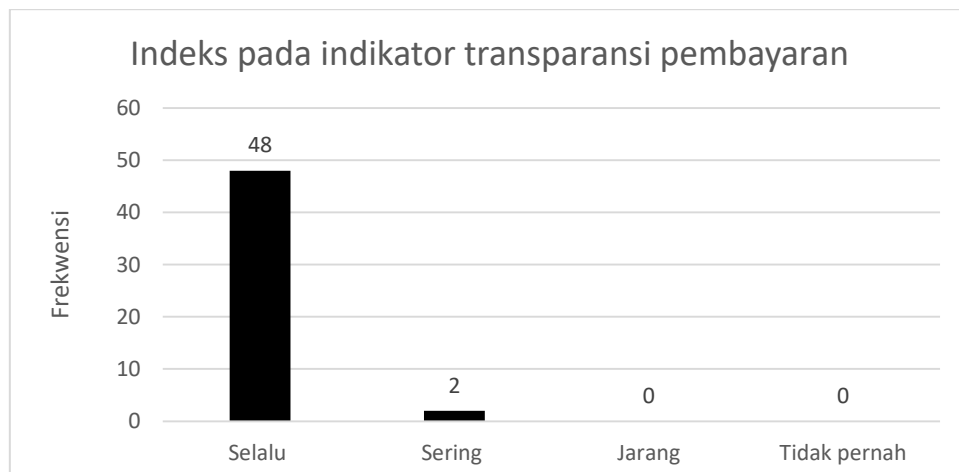
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,96

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih selalu transparasi dalam pembayaran

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	48	96
2.	Sering	3	2	4
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak pernah	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.8. Indikator Percaloan

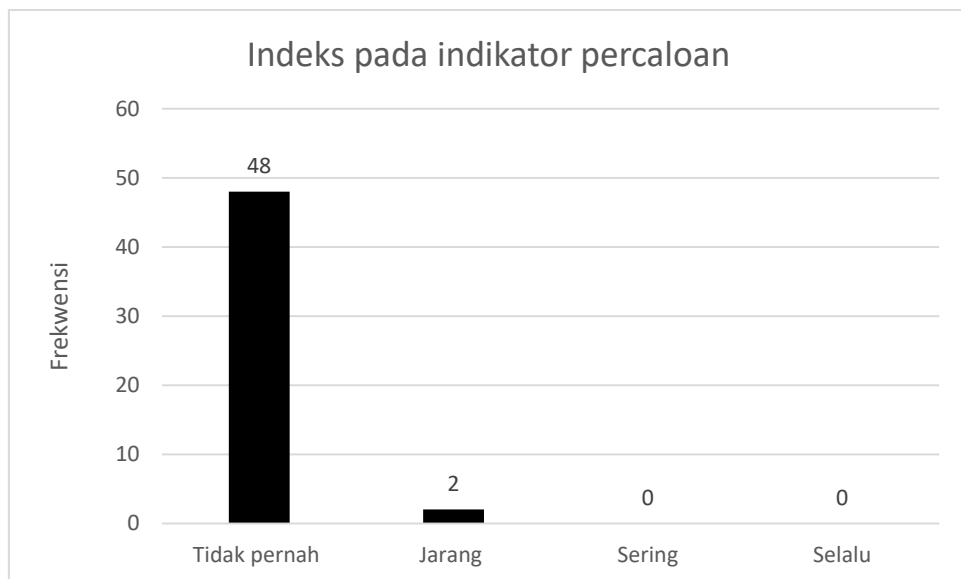
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,96

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak pernah	4	48	96
2.	Jarang	3	2	4
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

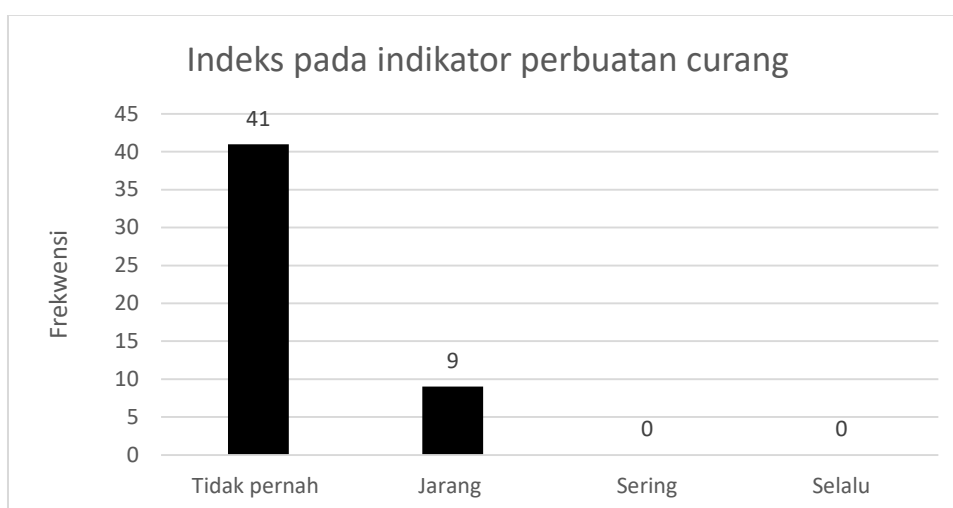
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,82

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak pernah	4	41	82
2.	Jarang	3	9	18
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			50	100



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

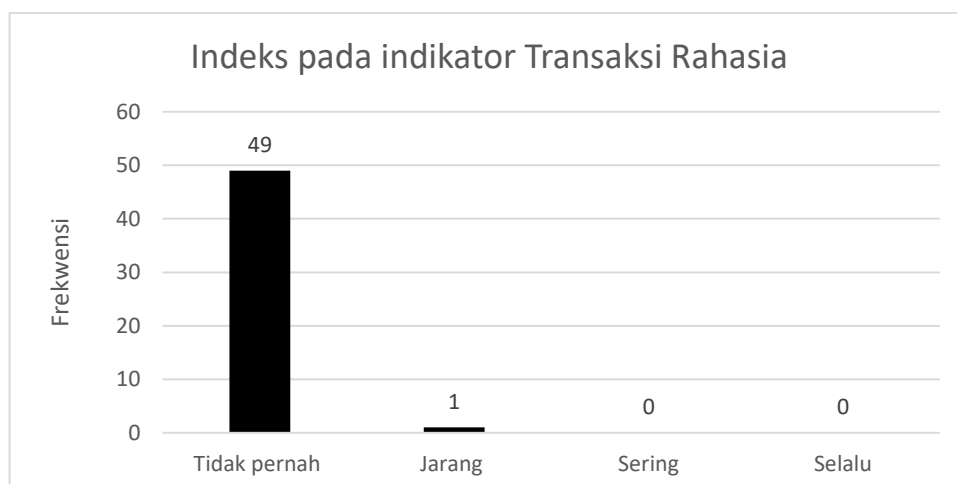
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,98

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak pernah	1	49	98
2.	Jarang	2	1	2
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	0	0
Jumlah			50	100



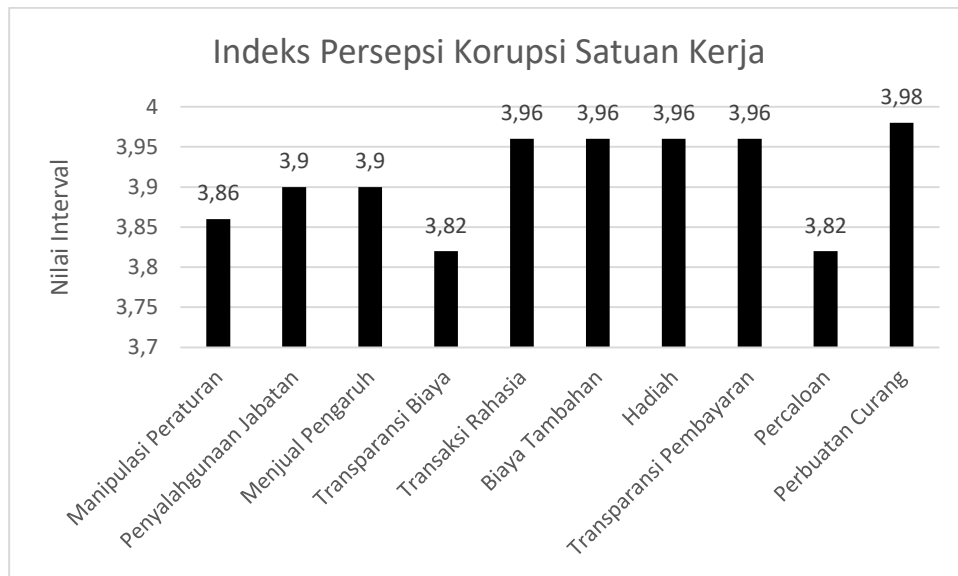
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan sebesar 3,91

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan

No	Ruang lingkup	Nilai Interval
1	Manipulasi Peraturan	3,86
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,9
3	Menjual Pengaruh	3,9
4	Transparansi Biaya	3,82
5	Transaksi Rahasia	3,96
6	Biaya Tambahan	3,96
7	Hadiah	3,96
8	Transparansi Pembayaran	3,96
9	Percaloan	3,82
10	Perbuatan Curang	3,98



Indeks 3,91 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 97,80

Tabel 20.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pekalongan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	
2	
3	
4	
5	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pekalongan memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,91 **atau** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,86
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,9
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,9
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,82
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,96
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,96
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,96
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,82
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,98

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2020 bulan Januari s/d Juni tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,78 atau masuk pada persepsi 85,25 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transparansi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	Berlaku?	c) Jarang Sesuai Prosedur d) Tidak Sesuai Prosedur
2.	Apakah Dalam Memperoleh Layanan Pengadilan Secara Cepat Dan Mudah Selalu Diberikan Tanpa Ada Penawaran Dari Petugas Untuk Meminta Imbalan Tertentu?	a) Petugas Melayanai Tanpa Meminta Imbalan b) Petugas Melayanai Jarang Meminta Imbalan c) Petugas Melayanai Sering Meminta Imbalan d) Petugas Melayanai Selalu Meminta Imbalan
3.	Pernahkah Dihubungi Oleh Seseorang (Karyawan Pengadilan) Yang Akan Membantu Dalam Pengurusan Surat/ Berkas Perkara?	a) Tidak Pernah b) Jarang/ Pernah c) Sering d) Selalu
4.	Apakah Selalu Mudah Dalam Mendapatkan Informasi Tentang Tarif/ Biaya Baik Melalui Website Ataupun Petugas Pelayanan?	a) Selalu b) Sering c) Jarang d) Tidak Pernah
5.	Apakah Selalu Membayar Sesuai Tarif Resmi Tanpa Ada Biaya Tambahan?	a) Selalu b) Sering c) Jarang d) Tidak Pernah
6.	Apakah Memberikan Tanda Terima Kasih Atas Pelayanan Yang Diterima (Meskipun Tidak Dimintai)?	a) Tidak Pernah b) Jarang/ Pernah c) Sering d) Selalu
7.	Apakah Menerima Bukti Transaksi Keuangan/ Pembayaran Yang Sah Setelah Proses Pembayaran Dilakukan?	a) Selalu b) Sering c) Jarang d) Tidak Pernah
8.	Apakah Pernah Mengetahui Ada Praktek Percaloan Dalam Pengurusan Layanan Di Pengadilan?	a) Tidak Pernah b) Jarang/ Pernah c) Sering d) Selalu
9.	Apakah Pernah Melihat Dan/ Atau Mendengar Masih Terjadi Praktek KKN Di Pengadilan?	a) Tidak Pernah b) Jarang/ Pernah c) Sering d) Selalu
10.	Apakah Pernah Mengurus Perkara Melalui Hakim/ Panitera/ Staff Pengadilan di Luar Persidangan?	a) Tidak Pernah b) Jarang/ Pernah c) Sering d) Selalu

**ANALISA DATA
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI**



Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51116

Telp. (0285) 422102, Fax : (0285) 422288, Email : pn_pkl@yahoo.com

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN										Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	
4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
8	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	
37	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
38	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai Total	193	195	195	191	198	198	198	198	191	199	
I.P.K.	3,86	3,9	3,9	3,82	3,96	3,96	3,96	3,96	3,82	3,98	3,91
Nilai Interval Konversi IPK											97,80
KINERJA											Bersih dari Korupsi

Nilai Persepsi IPK	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak Bersih Korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62,50	2	Kurang Bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi